panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE

TAHUN 2024

PEMERINTAH KAB. LUWU



SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
SPBE

Sinergi untuk Indonesia Maju

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuania-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE





EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

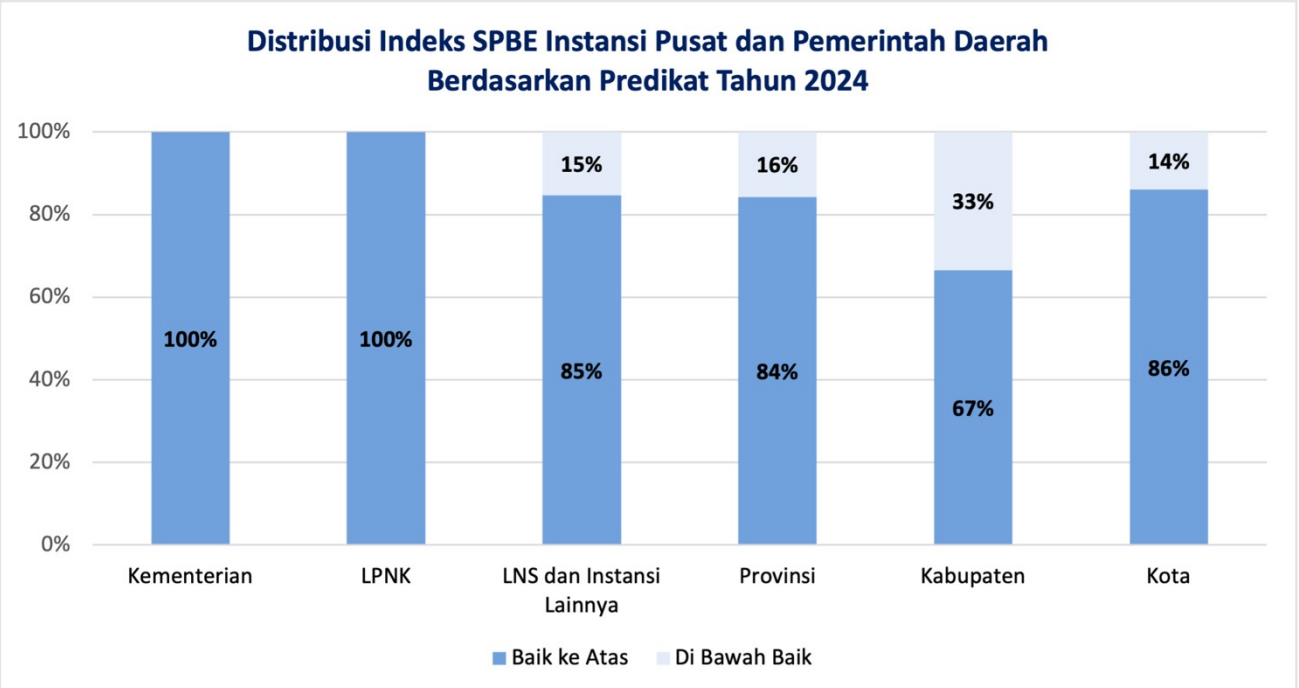
Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	**13%**
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	**25%**
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	**16,5%**
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	**45,5%**
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik	18%

Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

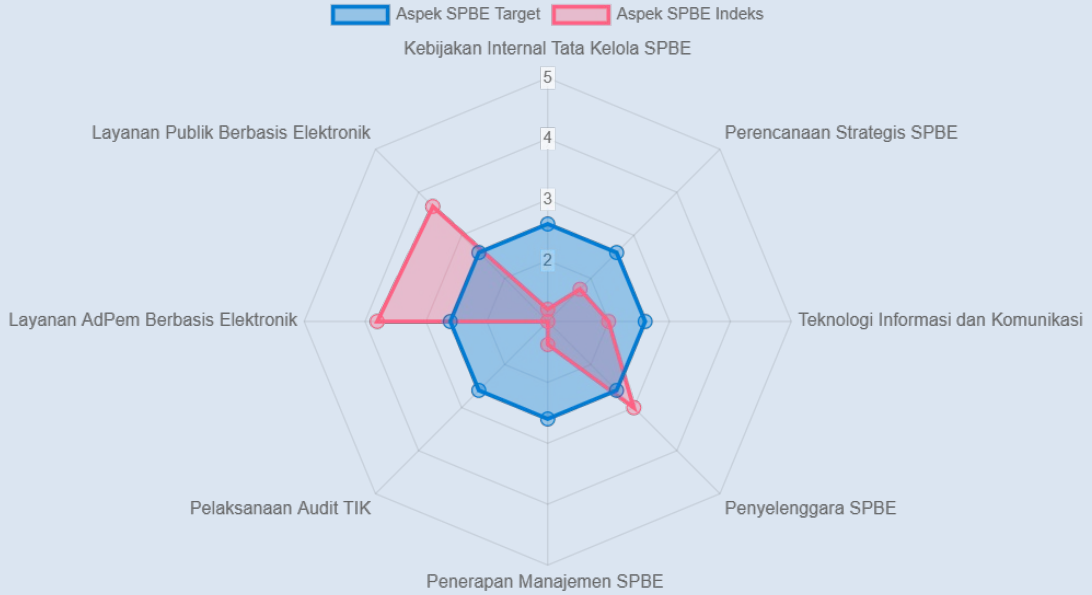
Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	**3,36**	**4,28**	**4,01**	**3,61**	**3,61**	**2,51**	**3,64**
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	**2,62**	**3,92**	**3,65**	**3,11**	**3,07**	**1,69**	**2,94**
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	**1,86**	**2,87**	**2,61**	**2,31**	**2,17**	**1,13**	**2,03**
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	**3,78**	**4,44**	**4,26**	**3,81**	**3,98**	**3,32**	**4,05**
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15



INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. LUWU

2,6
(Baik)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	**2,6**
Domain Kebijakan SPBE	1,20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	*1,20*
Domain Tata Kelola SPBE	2,10
Perencanaan Strategis SPBE	*1,75*
Teknologi Informasi dan Komunikasi	*2,00*
Penyelenggara SPBE	*3,00*
Domain Manajemen SPBE	1,27
Penerapan Manajemen SPBE	*1,38*
Audit TIK	*1,00*
Domain Layanan SPBE	3,75
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	*3,80*
Layanan Publik Berbasis Elektronik	*3,67*

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan, pada aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, belum terpenuhi dengan adanya indikator 1 – 10, Kebijakan Arsitektur SPBE selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional, mencakup enam domain utama. Peta Rencana SPBE mendukung tata kelola terintegrasi, sementara kebijakan Manajemen Data menjamin pengelolaan informasi menyeluruh. Kebijakan Layanan Jaringan Intra Instansi Daerah untuk konektivitas antarunit. Sistem Penghubung Layanan diatur untuk integrasi optimal dan Manajamen Keamanan Informasi, memprioritaskan perlindungan data strategis. Audit TIK mencakup evaluasi infrastruktur, aplikasi dan keamanan, sementara pembentukan Tim Koordinasi SPBE memastikan koordinasi efektif dan keberlanjutan implementasi SPBE.

- Kekuatan
  Terletak pada upaya penyusunan kebijakan yang mendukung implementasi SPBE, meskipun tidak menunjukkan adanya keunggulan yang signifikan.
- Kelemahan
  Terletak pada penggunaan acuan yang berbeda dengan acuan SPBE. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian dalam penerapan kebijakan, terutama dalam pengelolaan arsitektur, peta rencana dan manajemen data.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan, penerapan pada aspek perencanaan strategis SPBE belum terpenuhi dengan adanya indikator 11 – indikator 14. Terkait arsitektur SPBE, Kabupaten Luwu belum sepenuhnya mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional, sehingga penerapannya belum optimal. Peta Rencana SPBE, juga belum mencakup keseluruhan elemen yang diperlukan. Selain itu, inovasi proses bisnis dan pembangunan aplikasi SPBE belum sepenuhnya terarah dan lengkap.

- Kekuatan
  Adanya kebijakan dasar yang mendukung perencanaan SPBE, meskipun tidak ada keunggulan yang signifikan. Kebijakan ini memberikan fondasi bagi penerapan SPBE, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan untuk mencapai keselarasan penuh dengan standar nasional dan efektivitas yang optimal.
- Kelemahan
  Belum secara lengkap mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang dibutuhkan sebagai acuan dalam penyusunan setiap domain Arsitektur SPBE. Selain itu, Peta Rencana SPBE yang ada masih memuat sebagian konten dari tujuh muatan yang seharusnya ada, yang menghambat keselarasan dan integrasi penuh dalam perencanaan SPBE.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan, penerapan pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi telah terpenuhi dengan adanya indikator 15 – indikator 18. Pembangunan aplikasi SPBE telah mengatur siklus pembangunan aplikasi, meskipun perlu penguatan di tahap implementasi. Layanan Pusat Data telah menggunakan Pusat Data Nasional untuk pengelolaan data terpusat. Layanan Jaringan Intra Instansi mendukung konektivitas antarinstansi, meskipun masih perlu peningkatan dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan sudah diterapkan, namun perlu perbaikan dalam antarinstansi.

- Kekuatan
  Telah menggunakan PDN untuk pengelolaan data terpusat, serta menerapkan jaringan Intra IPPD yang mendukung konektivitas antarunit kerja. Penggunaan PDN dan jaringan Intra IPPD ini meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan komunikasi antarinstansi dalam pemerintahan.
- Kelemahan
  Belum ditetapkannya atau ditandatanganinya SOP Aplikasi. Hal ini menghambat standarisasi dan pengaturan yang jelas terkait pengelolaan aplikasi, sehingga dapat mempengaruhi konsistensi dan efektivitas penggunaan aplikasi dalam mendukung proses pemerintahan.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan, penerapan pada aspek Penyelenggara SPBE telah terpenuhi dengan adanya indikator 19 – indikator 20. Terkait dengan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE, telah dibentuk Tim Koordinasi SPBE yang bertugas mengatur dan memastikan implementasi SPBE di seluruh perangkat daerah. Mengenai Kolaborasi Penerapan SPBE, menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu telah melakukan beberapa kolaborasi antara perangkat daerah, meskipun masih perlu ditingkatkan agar lebih terstruktur dan efektif dalam mendukung implementasi SPBE yang lebih baik.

- Kekuatan

Telah memiliki tim kordinasi SPBE, serta kegiatan berkoordinasi yang terstruktur dalam implementasi SPBE. Tim ini berperan penting dalam mengatur dan memastikan keberlanjutan pelaksanaan SPBE di seluruh perangkat daerah, meningkatkan koordinasi dan integrasi antarinstansi dalam mendukung efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

- Kelemahan
  Tidak memiliki kelemahan yang signifikan. Meskipun tim koordinasi SPBE telah dibentuk dan kegiatan koordinasi berjalan, tantangan yang ada lebih pada penguatan dan peningkatan efektivitas kolaborasi antarinstansi, serta memastikan seluruh kegiatan SPBE dapat berjalan dengan lebih terstruktur dan terukur.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan, belum terpenuhi dengan adanya indikator 21 – indikator 28. Manajemen Risiko, Keamanan Informasi, Data dan Aset TIK belum sepenuhnya terencana dan selaras dengan Peta Rencana SPBE. Begitu juga dengan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, perubahan dan Layanan SPBE yang masih belum efektif diimplementasikan sesuai dengan perencanaan yang ada.

- Kekuatan
  Tidak ada keunggulan yang signifikan. Meskipun berbagai kebijakan telah disusun, penerapannya masih memerlukan perbaikan dan penguatan di berbagai area untuk mencapai efektivitas yang optimal.
- Kelemahan
  Belum ditetapkannya Peta Rencana SPBE. Hal ini menghambat perencanaan yang terstruktur dan keselarasan antara kebijakan, sumber daya, serta proses yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi SPBE secara efektif di seluruh perangkat daerah.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada aspek Pelaksanaan Audit TIK belum terpenuhi dengan adanya indikator 29 – indikator 31. Pelaksanaan audit infrastruktur yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Mengenai Audit Aplikasi SPBE, menunjukkan bahwa Audit Aplikasi belum dilakukan secara menyuluruh sesuai dengan standar yang ditetapkan. Begitu juga pada Audit Keamanan SPBE, yang belum mencakup seluruh aspek keamanan aplikasi dan infrastruktur yang diperlukan.

- Kekuatan
  Tidak ada keunggulan dalam pelaksanaannya, kebijakan ini memberikan fondasi untuk peningkatan audit infrastruktur, aplikasi dan keamanan TIK di masa mendatang.
- Kelemahan
  Belum dilakukannya Audit TIK secara menyeluruh. Hal ini menghambat evaluasi dan pemantauan yang efektif terhadap infrastruktur, aplikasi dan sistem keamanan TIK, yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas penerapan SPBE di pemerintah daerah.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik telah terpenuhi dengan adanya indikator 32 – indikator 41. Layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta kepegawaian telah memanfaatkan aplikasi berbasis elektronik untuk meningkatkan efisiensi administrasi. Begitu pula layanan kearsipan, pengelolaan barang milik daerah dan pengawasan internal yang mendukung akuntabilitas. Aplikasi untuk akuntabilitas kinerja organisasi dan kinerja pegawai juga telah diterapkan, meskipun masih perlu peningkatan untuk pemanfaatan yang lebih optimal.

- Kekuatan
  Telah menggunakan aplikasi berbagi pakai untuk IPPD. Penggunaan aplikasi ini mendukung efisiensi, kemudahan dalam proses administrasi, sehingga layanan pemerintahan berbasis elektronik dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.
- Kelemahan
  Tidak ada kelemahan. Meskipun demikian, peningkatan pemanfaatan aplikasi dan pengoptimalan integrasi antarinstansi tetap dilakukan untuk mendukung layanan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik telah terpenuhi dengan adanya indikator 42 – indikator 47. JDIH, informasi publik telah memanfaatkan aplikasi berbasis elektronik. Hal ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam penerapan teknologi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik yang transparan dan efisien.

- Kekuatan

Penerapan layanan publik berbasis elektronik di Kabupaten Luwu telah menunjukkan hasil yang signifikan.

- Kelemahan
  Terbatasnya integrasi antar aplikasi lintas sektor dan kurangnya bukti dokumentasi penggunaan aplikasi secara menyeluruh dapat mengurangi dampak positif yang diharapkan.

REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Luwu untuk peningkatan penerapan SPBE mencakup memastikan keselarasan referensi Arsitektur SPBE Nasional dan enam domainnya melalui kebijakan yang ditinjau ulang agar sesuai dengan standar nasional, mendukung integrasi yang lebih efektif. Penting juga untuk melengkapi komponen dasar arsitektur dan muatan Peta Rencana SPBE, menyesuaikan anggaran, serta memastikan pemenuhan proses bisnis baru maupun yang telah ada agar perencanaan lebih terintegrasi. Penetapan dan penandatanganan SOP Aplikasi sebagai panduan operasional diperlukan, disertai penerapan jaringan Intra IPPD secara menyeluruh dan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk integrasi optimal antarinstansi. Selain itu, perlu dijelaskan prosedur integrasi dan kolaborasi Tim Koordinasi SPBE dengan kegiatan lain melalui penyusunan SOP yang mengatur mekanisme koordinasi dan komunikasi antarinstansi. Penetapan Peta Rencana SPBE sebagai acuan juga diperlukan untuk meningkatkan koordinasi, keselarasan, dan efektivitas manajemen SPBE. Terakhir, audit menyeluruh terhadap infrastruktur, aplikasi, dan sistem keamanan TIK harus dilakukan untuk memastikan semua sistem berfungsi dengan baik, aman, dan sesuai dengan standar, sekaligus mendeteksi potensi masalah yang dapat menghambat efektivitas penerapan SPBE.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	1
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	1
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	1
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	1
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	1
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	1
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	2
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Sinergi untuk Indonesia Maju

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2024